



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Azwir Nazar, tempat/tgl lahir Lambada Lhok, 4 Januari 1983, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa/Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Lambada Lhok pada tanggal 04 Januari 1983 dari Ayah Bernama Zulkifli AR dan Ibu Bernama Arsyadani ZA;
2. Bahwa Pemohon bernama AZWIR NAZAR lahir di lambada lhok pada tanggal 04 Januari 1983 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 475/DIS/2005 dan Kartu Keluarga No.1106202107060040 dan KTP No. 1106200401830001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk menambah nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran dari AZWIR NAZAR menjadi AZWIR NAZAR (TGK TURKI) untuk ditetapkan pada kertas suara pemilihan dan menyesuaikan dengan administrasi lainnya;
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menambah nama Pemohon tersebut karena lebih dikenal dan familiar dalam keseharian di masyarakat umum dan keperluan pencalonan pada Pemilu Legislatif tahun 2024;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- A. Foto copy KTP;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth



- B. Foto copy Kartu Keluarga;
- C. Foto copy Akta Kelahiran;
- D. Foto copy Ijazah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantbo agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari yang semula bernama AZWIR NAZAR menjadi AZWIR NAZAR (TGK TURKI) yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk digunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;
3. Memerintahkan instansi terkait untuk menambahkan nama Pemohon pada Surat Suara Pemilihan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 hingga P.4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Nazrul Fahri dan Rizalul Akbar yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jantbo

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapannya menambah nama Pemohon dari yang semula bernama Azwir Nazar menjadi Azwir Nazar (Tgk Turki), dengan tujuan untuk pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dikarenakan Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Azwir Nazar (Tgk Turki);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 hingga P.4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Nazrul Fahri dan Rizalul Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada dokumen-dokumen pribadinya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106200401830001 (vide bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106202107060040 (vide bukti P.2), Akta Kelahiran Nomor 475/DIS/2005 (vide bukti P.3);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama Zulkifli AR dan ibu bernama Arsyadani ZA;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Desa/Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar;
- Bahwa pada saat pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) nanti Pemohon ingin menambahkan (Tgk Turki) di belakang nama Pemohon karena lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat Pemilu, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari yang semula Azwir Nazar menjadi Azwir Nazar (Tgk Turki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106200401830001, diketahui Pemohon berdomisili di Desa/Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106200401830001 (vide bukti P.1) dalam permohonannya bermaksud menambahkan nama yaitu (Tgk Turki) di belakang nama Pemohon sehingga menjadi bernama Azwir Nazar (Tgk Turki) untuk keperluan bakal Calon Legislatif (Caleg);

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai riwayat hidup Bakal Calon;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan secara rinci bahwa daftar riwayat hidup bakal calon meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Jenis Pemilihan;
2. Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Nomor Urut Bakal Calon;
4. Nama Lengkap; dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin nomor 4 (empat) tentang nama lengkap, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan nama yang ditulis pada daftar riwayat hidup bakal calon, maka haruslah dilampiri surat penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk penambahan nama Pemohon sehubungan dengan untuk pendaftaran Calon Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada surat suara saja dari yang semula dengan bernama Azwir Nazar menjadi Azwir Nazar (Tgk Turki) agar lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat pemilihan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penambahan nama Pemohon dari yang semula bernama Azwir Nazar menjadi Azwir Nazar (Tgk Turki) khusus untuk keperluan pendaftaran bakal calon legislatif tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka, sudah sepatutnya permohonan Permohonan untuk diterima dan dikabulkan menurut hukum oleh Pengadilan sebagaimana petitum ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama **Azwir Nazar** menjadi **Azwir Nazar (Tgk Turki)** yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk menambahkan nama Pemohon pada Surat Suara Pemilihan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Faizah Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Faizah

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)